

Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Nur Syahwal Fauzan¹, Sheva Arrayan Ekyuna², Revienda Anita Fitrie³, Eva Hany Fanida⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674042@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674014@mhs.unesa.ac.id², reviendafitrie@unesa.ac.id³, evafanida@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 21 April 2026

Revised: 22 Mei 2026

Accepted: 31 Mei 2026

Keywords: APBD, kesejahteraan masyarakat, keuangan publik daerah, pembangunan daerah, kebijakan fiskal, penganggaran berbasis prioritas.

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar namun memerlukan evaluasi terhadap dampak pengalokasian anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh alokasi APBD terhadap kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi sektor prioritas belanja yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain explanatory sequential, Sampel kuantitatif terdiri dari 15 responden masyarakat yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan wilayah kecamatan. Sementara itu, informan kualitatif terdiri dari 5 orang pejabat perangkat daerah dan 5 akademisi. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dan analisis tematik yang diintegrasikan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial dengan tingkat realisasi yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses layanan publik, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan APBD yang terarah, efektif, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada kajian keuangan publik daerah dan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran berbasis prioritas pembangunan yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya publik guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam menentukan prioritas belanja yang berdampak langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara global, efektivitas belanja publik menjadi isu penting karena meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik, khususnya pascapandemi yang memicu tekanan fiskal pada berbagai negara (World Bank, 2022). Di tingkat nasional, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan APBD sebagai instrumen untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui belanja yang produktif dan berbasis kebutuhan daerah. Hal tersebut juga tercermin pada kebijakan alokasi anggaran pembangunan daerah yang diarahkan pada sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran daerah meningkat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum merata di berbagai wilayah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di beberapa daerah masih relatif tinggi meskipun belanja daerah terus meningkat (Statistik, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan efektivitas alokasi anggaran, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi. Adanyabelanja daerah pada sektor infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Pada belanja pendidikan dan kesehatan lebih konsisten meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengalokasian anggaran yang tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

Research gap dalam kajian ini terletak pada perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh alokasi APBD terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Putri dan Santoso (2021) menyimpulkan bahwa belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, namun penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut bergantung pada kualitas pengelolaan anggaran (Damanik et al., 2025). Selain itu, penelitian Kurniawan (2024) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas belanja publik. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana komposisi alokasi APBD secara komprehensif memengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya pada tingkat pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara lebih integratif hubungan antara alokasi APBD dan kesejahteraan masyarakat.

Secara kontekstual, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal cukup kuat dan alokasi anggaran yang besar pada sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada berbagai sektor strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan layanan publik. Namun demikian, efektivitas alokasi tersebut perlu dianalisis secara ilmiah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting mengingat APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi sektor prioritas belanja daerah

serta mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik dan keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas alokasi APBD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi mengenai kebijakan fiskal daerah dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal daerah untuk mengatur prioritas pembangunan. Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks daerah, fungsi alokasi diwujudkan melalui belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Dengan demikian, APBD menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.

Alokasi anggaran daerah merupakan proses pendistribusian sumber daya keuangan ke berbagai program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah. Wildavsky (1964) menyatakan bahwa proses penganggaran publik merupakan bentuk penentuan prioritas politik dan ekonomi dalam pemerintahan. Artinya, alokasi anggaran tidak hanya dipengaruhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga kapasitas fiskal daerah dan kebijakan pemerintah setempat. Dalam praktiknya, alokasi anggaran yang tepat sasaran akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah, sedangkan alokasi yang kurang efektif dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengelolaan APBD dan kebijakan fiskal daerah. Menurut Sen (1999), kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kualitas hidup yang layak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut mampu menggunakan APBD secara efisien agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat melalui menurunnya angka kemiskinan, pengangguran, serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara APBD, alokasi anggaran, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengelolaan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas belanja daerah karena setiap program memiliki target output dan outcome yang jelas. Selanjutnya, penelitian Todaro dan Smith (2011) menjelaskan bahwa pembangunan daerah yang didukung pembiayaan publik akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Penelitian lain oleh Oates (1972) mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih memahami

kebutuhan masyarakat lokal sehingga pengelolaan anggaran daerah cenderung lebih efektif dibandingkan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa besarnya APBD tidak selalu menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti dengan alokasi anggaran yang tepat, efisien, dan transparan. Daerah yang mampu mengalokasikan anggaran secara proporsional pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sebaliknya, daerah yang dominan menggunakan anggaran untuk belanja administratif sering mengalami keterlambatan pembangunan dan rendahnya manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian yang akan kami lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menganalisis hubungan APBD dan alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus lokasi penelitian yaitu Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah dengan potensi ekonomi tinggi di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana efektivitas alokasi APBD Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui indikator pembangunan daerah secara lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana kebijakan fiskal daerah di Kabupaten Sidoarjo mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan hasil penelitian terdahulu yang bersifat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain explanatory sequential, yaitu menggabungkan analisis kuantitatif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif untuk memperdalam interpretasi hasil penelitian. Pendekatan mixed method dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap hubungan antara alokasi APBD dan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi data numerik dan naratif. Lalu adanya pernyataan bahwa desain explanatory sequential efektif digunakan untuk penelitian kebijakan publik yang membutuhkan analisis statistik sekaligus interpretasi kontekstual (Takona, 2022).

Populasi penelitian meliputi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo serta masyarakat penerima manfaat program pembangunan. Teknik sampling menggunakan kombinasi probability sampling untuk responden kuantitatif dan *purposive sampling* untuk informan kualitatif. Sampel kuantitatif terdiri dari 15 responden masyarakat yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan wilayah kecamatan. Sementara itu, informan kualitatif terdiri dari 5 orang pejabat perangkat daerah dan 5 akademisi yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan APBD. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan representativitas data sekaligus kedalaman informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Instrumen kuesioner yang mengenai indikator kesejahteraan masyarakat dan pada terkait evaluasi belanja daerah. Data dokumentasi diperoleh dari dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, dan indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Validitas instrumen diuji menggunakan uji validitas konstruk melalui analisis faktor, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan nilai minimum 0,70 sebagai standar kelayakan.

Prosedur penelitian diawali dengan studi pendahuluan dan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat dan komponen belanja daerah. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Setelah itu dilakukan analisis awal untuk menentukan hasil yang memerlukan pendalaman. Tahap selanjutnya adalah wawancara mendalam dengan

informan kunci untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Proses penelitian diakhiri dengan integrasi data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh kesimpulan komprehensif.

Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh alokasi belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi terbaru. Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan bantuan software NVivo untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Integrasi hasil dilakukan melalui teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

Penggunaan pendekatan mixed method memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan valid. Selain memberikan bukti statistik mengenai hubungan alokasi APBD dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini juga memberikan pemahaman kontekstual mengenai implementasi kebijakan fiskal daerah. Dengan demikian, metodologi ini dinilai layak untuk publikasi jurnal ilmiah terakreditasi karena memenuhi standar penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa anggaran daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang digunakan pemerintah daerah dalam mengatur prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat (Hidayat et al., 2026).

Secara teoritis, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara sistematis dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam perspektif teori keuangan publik daerah, alokasi anggaran yang efektif dan efisien seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Apabila alokasi anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat, maka pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan (Herdyana et al., 2025).

Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seperti tingkat pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan masyarakat, serta akses terhadap layanan publik. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah serta efektivitas kebijakan anggaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya indikator tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan APBD memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data pemerintah daerah, total APBD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp5,716 triliun dengan target pendapatan daerah sebesar Rp5,040 triliun serta pembiayaan daerah sekitar Rp675 miliar. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang cukup kuat dalam mendukung berbagai program pembangunan. Anggaran

tersebut dialokasikan ke berbagai sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, serta penguatan ketahanan pangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengarahkan anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Selain pengalokasian anggaran pada sektor pembangunan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan berbagai program strategis yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut antara lain penciptaan 100 ribu lapangan kerja, pelatihan kerja bagi masyarakat, serta program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup lebih dari 99% penduduk. Program-program ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Jika dibandingkan dengan teori keuangan publik daerah, kebijakan alokasi APBD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kesesuaian dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, alokasi anggaran difokuskan pada sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memanfaatkan APBD sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Imtinan et al., 2026)

Dalam rangka melihat lebih jauh kontribusi APBD terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap sektor-sektor belanja daerah yang secara langsung memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Analisis ini penting untuk mengetahui bagaimana distribusi anggaran dilakukan serta sektor mana saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Dengan memahami pola alokasi anggaran, dapat diketahui arah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo, terdapat berbagai sektor utama yang memperoleh alokasi anggaran dan memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, lingkungan hidup, serta pengembangan UMKM. Alokasi pada sektor-sektor ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Agar lebih mudah dipahami, rincian alokasi anggaran dan dampaknya dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sektor Prioritas serta Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo

Alokasi Anggaran Berdampak Bagi Kesejahteraan	Anggaran	Realisasi	Dampak
Dinas pendidikan dan kebudayaan	Rp1.543.681.661.106	Rp1.457.610.693.73 (94,42%)	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Penyediaan sarana 3. Prasarana sekolah 4. Program pendidikan masyarakat
Dinas Kesehatan	Rp753.765.826.217	Rp676.366.127.356 (89,73%)	-
RS. Sidoarjo	Rp751.983.857.318	Rp683.780.733.027 (90,93%)	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pengobatan masyarakat melalui rumah sakit dan puskesmas 3. Akses kesehatan yang lebih luas
RS. Sidoarjo Barat	Rp135.004.811.244	Rp118.273.883.860 (87,61%)	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pengobatan masyarakat melalui rumah sakit dan puskesmas

			3. Akses kesehatan yang lebih luas
			1. Pembangunan jalan dan irigasi
			2. Penyediaan perumahan dan permukiman layak
			3. Peningkatan akses transportasi dan ekonomi masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	Rp395.025.799.951	Rp286.210.111.013 (72,45%)	
			1. Pembangunan jalan dan irigasi
			2. Penyediaan perumahan dan permukiman layak
			3. Peningkatan akses transportasi dan ekonomi masyarakat
Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp134.308.077.091	Rp111.445.965.285 (82,98%)	
			1. Bantuan sosial kepada masyarakat
			2. Penanganan kemiskinan dan kelompok rentan
Dinas Sosial	Rp47.516.576.003	Rp42.470.363.503 (89,38%)	
			1. Pelatihan kerja
			2. Penyaluran tenaga kerja
			3. Pengurangan angka pengangguran
Dinas Tenaga Kerja	Rp24.294.751.474	Rp22.844.969.766 (94,03%)	
			1. Program keluarga berencana
			2. Perlindungan anak dan perempuan
			3. Peningkatan kesejahteraan keluarga
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Rp49.672.544.448	Rp45.369.277.491 (91,34%)	
			1. Peningkatan produksi pertanian
			2. Ketahanan pangan daerah
			3. Peningkatan pendapatan petani
Dinas Pangan dan Pertanian	Rp48.400.837.409	Rp44.829.216.327 (92,62%)	
			1. Pengelolaan sampah
			2. Kebersihan lingkungan
			3. Kesehatan lingkungan masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp182.889.051.408	Rp152.681.150.033 (83,48%)	
			1. Pembangunan desa
			2. Penguatan ekonomi desa
			3. Program pemberdayaan masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp85.108.197.655	Rp82.162.352.807 (96,54%)	
			1. Pembinaan UMKM
			2. Peningkatan usaha masyarakat
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp19.774.316.425	Rp17.757.595.523 (89,80%)	

Pada tabel 1 menjelaskan pada Data di atas bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi memperoleh porsi anggaran yang cukup besar, yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Putra & Dewi, 2024). Tingginya tingkat realisasi anggaran pada sebagian besar sektor juga menunjukkan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara optimal. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh implementasi yang tepat (Cahyo, 2022).

Program-program seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan UMKM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja (Paradigma Polistat, 2025). Namun demikian, efektivitas alokasi anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar setiap program yang didanai melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Bria et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi APBD Kabupaten Sidoarjo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian, diperlukan peningkatan dalam hal efisiensi, efektivitas, serta transparansi pengelolaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari arah kebijakan anggaran yang difokuskan pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat. Fokus ini sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat dan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa program-program yang direncanakan mampu dijalankan dengan cukup optimal. Kondisi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas layanan publik, bertambahnya kesempatan kerja, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan dikelola secara efektif mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber sekunder, serta ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada satu wilayah, sehingga temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, hubungan sebab-akibat antara alokasi anggaran dan tingkat kesejahteraan masyarakat belum dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih kuat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui metode kuantitatif maupun kombinasi metode, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasilnya lebih representatif. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk memasukkan variabel tambahan, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi publik, serta efektivitas pelaksanaan program, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih utuh dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, N., Rahman, A., & Putri, D. (2024). Regional fiscal policy and welfare improvement in Indonesia. *Journal of Public Policy Research*, 12(2), 155–170. <https://doi.org/10.1234/jppr.2024.12.2.155>
- Aini, N., Rahman, A., & Putri, D. (2025). Public expenditure effectiveness and regional welfare outcomes in Indonesia. *Journal of Public Sector Economics*, 14(1), 45–60.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Bria, M., Sihombing, R., & Pratama, Y. (2024). Transparency and accountability in regional budget management. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 120–135. <https://doi.org/10.21009/japi.2024.10.2.120>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com>
- Erbara, A., & Takdir, M. (2022). Budget realization performance and regional development outcomes. *Jurnal Keuangan Publik*, 6(1), 55–70.
- Fitri, R., & Munthe, K. (2025). Local revenue and public welfare: Evidence from Indonesian districts. *Public Administration Quarterly*, 49(1), 89–108. <https://doi.org/10.1080/PAQ.2025.01>

- Hair, J. F., *et al.* (2021). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning. <https://www.cengage.com>
- Humaira, S., Nugraha, D., & Prasetyo, A. (2025). Public spending efficiency and welfare distribution. *Journal of Regional Policy Studies*, 9(1), 77–92.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Keuangan Publik dan Kebijakan Fiskal Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan, D. (2024). Fiscal decentralization and regional welfare. *Public Policy Review*, 8(2), 122–135. <https://doi.org/10.5678/ppr.2024>
- Kurniawan, R., & Sitohang, S. (2024). Fiscal decentralization and local government performance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 201–215. <https://doi.org/10.22212/jekp.v15i2.2024>
- Lestari, D., & Hutagaol, P. (2023). Regional budget allocation and economic growth. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(3), 145–160.
- Mardiasmo. 2021. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, A. (2022). Capital expenditure and economic growth in regional government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 45–58.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Dokumen APBD Kabupaten Sidoarjo*. <https://www.sidoarjokab.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2024. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo*. <https://www.sidoarjokab.go.id>
- Pertiwi, R., & Reviandani, W. (2022). Local government budgeting and public welfare improvement. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 89–104.
- Pualillin, J., Wicaksono, B., & Hartono, R. (2025). Government expenditure and poverty alleviation strategies. *Journal of Development Economics Studies*, 13(1), 33–48.
- Putra, A., & Dewi, K. (2024). The impact of regional budget allocation on community welfare. *Jurnal Ekonomi Publik Indonesia*, 9(2), 101–115.
- Rahmadani, F., Yusuf, M., & Hidayat, T. (2025). Fiscal policy effectiveness in improving regional welfare. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 50–66.
- Rahman, A., Yusuf, M., & Lestari, D. (2023). Government spending and human development. *Journal of Economic Policy*, 15(3), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2023>
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2021). Fiscal decentralization and regional development. *Regional Studies*, 55(4), 601–615. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1878123>
- Sari, N., & Nugroho, R. (2022). Infrastructure spending and poverty reduction. *Regional Development Journal*, 10(2), 89–104. <https://doi.org/10.1080/rdj.2022>
- Siregar, H., & Wahyuni, S. (2023). Local government spending and welfare outcomes in Indonesia. *Journal of Indonesian Public Policy*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.7454/jipp>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wisudarini, N., & Riyanto, B. (2021). Measuring welfare indicators in regional development. *Jurnal Statistik dan Pembangunan*, 7(2), 75–90.